

# S O L U S I

Vol. 11 No. 3 / Juli 2012

**Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi yang Belum Mengambil Matakuliah Auditing dan yang Sudah Mengambil Matakuliah Auditing Terhadap Profesi Akuntan Publik (Studi Empiris pada Mahasiswa Program Studi S-1 Perguruan Tinggi di Semarang)**  
*Haniyo Adi Wibowo, Ardiani Ika S*

**Epistemologi dalam Kehidupan Bermasyarakat**  
*Elizabeth Lucky Maretha S.*

**Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Tengah)**  
*Solichatun, Tri Endang Yani*

**Evaluasi Dampak Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dalam Pengentasan Kemiskinan Perkotaan di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Kecamatan Sokaraja)**  
*Lilis Siti Badriah, Dijan Rahajuni*

**Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Hubungan Antara Kompensasi dan Motivasi Kerja dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening dalam Investasi Bertahap : Studi Eksperimen**  
*Desrir Miftai, Andi Irfan*

**Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesiediaan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha dalam Membayar Pajak (Studi di Kabupaten Pati Jawa Tengah)**  
*Hj. Widhy Setyowati, Hesty Ningtyas*

**Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**  
*Bambang Sudiyatno, Y. Willy Ciptadi A.*

**Rasio Keuangan dan Peringkat Obligas**  
*Ida Nurhayati*

**Kemampuan Keuangan Daerah Kota Semarang**  
*Maryono*

**Analisis Pengaruh Rasio Keuangan, Tingkat Inflasi dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Swasta Nasional di Indonesia yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2006 - 2009**  
*Melinda P, Febrina Nafasati P.*

# **S O L U S I**

**Mengkaji masalah-masalah sosial, ekonomi dan bisnis  
Terbitan 3 bulan sekali  
(Januari, April, Juli, Oktober)**

**Penerbit :  
Fakultas Ekonomi Universitas Semarang**

**Pelindung :  
Rektor Universitas Semarang**

**Penanggungjawab :  
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang**

**Dewan Redaksi :  
Prof. Dr. Pahlawansjah Harahap, SE., ME. (USM)  
Prof. Dr. Imam Ghozali, M Com., Hons., Akt. (UNDIP)  
Prof. Supramono, SE., MBA., DBA (UKSW)  
Prof. Dr. Dra. Sulastri, ME., M Kom. (UNISRI)  
Dr. Ir. Kesi Widjajanti, SE., MM. (USM)**

**Redaktur Pelaksana :  
Andy Kridasusila, SE., MM.  
Dr. Ardiani Ika S., SE., MM., Akt.  
Adijati Utaminingsih, SE., MM.**

**Sekretaris Pelaksana :  
Abdul Karim, SE., MSi., Akt.  
Susanto, SE., MM.**

**Tata Usaha :  
Ali Arifin**

**Alamat Penerbit/Redaksi :  
Jl. Soekarno Hatta (Tlogosari)  
Telp. (024) 6702757, Fax. (024) 6702272  
Semarang - 50196**

**Terbit Pertama kali : Juli 2002**

## KATA PENGANTAR

Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami, tatkala kami dapat hadir rutin setiap 3 bulan sekali untuk saling bertukar pikiran mengenai hal-hal baru di bidang ilmu ekonomi baik manajemen, akuntansi maupun studi pembangunan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca, pengirim artikel yang antusias untuk melakukan tukar pikiran dan berkomunikasi melalui media ini. Sekiranya hal ini dapat dipertahankan, maka selain kehadiran kami akan selalu dapat terlaksana dengan tepat waktu dan artikel yang beragam. wawasan pembaca juga akan semakin luas.

Penerbitan majalah ilmiah SOLUSI kali ini menghadirkan 10 (sepuluh) artikel yang telah kami anggap layak untuk diterbitkan, dengan harapan artikel-artikel ini dapat menjadi tambahan referensi bagi para pembaca dan menjadi sumbangan kami terhadap dunia ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu ekonomi bagi pengembangan organisasi swasta maupun institusi pemerintah Negara Republik Indonesia.

Hormat kami,

Redaksi

## DAFTAR ISI

	Hal.
1 Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi yang Belum Mengambil Matakuliah Auditing dan yang Sudah Mengambil Matakuliah Auditing Terhadap Profesi Akuntan Publik (Studi Empiris pada Mahasiswa Program Studi S-1 Perguruan Tinggi di Semarang) <i>Hanityo Adi Wibowo, Ardiani Ika S</i>	1 – 15
2 Epistimologi dalam Kehidupan Bermasyarakat <i>Elizabeth Lucky Maretha S.</i>	16 - 24
3 Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Tengah) <i>Solichatun, Tri Endang Yani</i>	25 - 34
4 Evaluasi Dampak Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dalam Pengentasan Kemiskinan Perkotaan di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Kecamatan Sokaraja) <i>Lilis Siti Badriah. Dijan Rahajuni</i>	35 - 47
5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Hubungan Antara Kompensasi dan Motivasi Kerja dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening dalam Investasi Bertahap : Studi Eksperimen <i>Desri Miftah, Andi Irfan</i>	48 - 62
6 Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesiediaan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha dalam Membayar Pajak (Studi di Kabupaten Pati Jawa Tengah) <i>Hj. Widhy Setyowati, Hesty Ningtyas</i>	63 - 85
7 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia <i>Bambang Sudiyatno, Y. Willy Ciptadi A.</i>	86 - 103
8 Rasio Keuangan dan Peringkat Obligasi <i>Ida Nurhayati</i>	104 - 123
9 Kemampuan Keuangan Daerah Kota Semarang <i>Maryono</i>	124 – 146
10 Analisis Pengaruh Rasio Keuangan, Tingkat Inflasi dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Swasta Nasional di Indonesia yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2006 – 2009 <i>Melinda P, Febrina Nafasati P.</i>	147 – 156

**EVALUASI DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN  
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SOKARAJA)**

Oleh:

Lilis Siti Badriah<sup>1)</sup>, Dijan Rahajuni<sup>1)</sup>

E-mail: ummililis@yahoo.co.id

<sup>1)</sup>Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

**ABSTRAKSI**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1). Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP) dalam pemberdayaan masyarakat, 2). PNPM MP peran dalam peningkatan pendapatan masyarakat peserta PNPM MP, 3). PNPM MP peran dalam mengurangi kemiskinan; 4). PNPM MP peran dalam meningkatkan kesejahteraan, dan 5). Tingkat distribusi pendapatan di masyarakat peserta PNPM MP; 6) Pengaruh jumlah tanggungan panjang tingkat pendidikan, bisnis dan modal usaha terhadap pendapatan masyarakat peserta PNPM MP.

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari daerah dekat dengan ibukota kecamatan, menengah ke ibukota kecamatan dan jarak terjauh ke ibukota Kecamatan Sokaraja. Untuk setiap wilayah diambil 10 persen dari KSM yang ada dan responden adalah semua anggota KSM dipilih sebagai sampel. Analisis data dilakukan dengan tabulasi, rasio atau proporsi, dan regresi berganda.

Hasilnya: 1). Pelaksanaan PNPM MP di Kecamatan Sokaraja dalam memberdayakan masyarakat secara keseluruhan sangat baik yang merupakan 82,05 persen responden menggunakan dana PNPM MP untuk kegiatan produktif, 2). Peran PNPM MP pada pendapatan keluarga secara keseluruhan masyarakat peserta PNPM MP adalah rata-rata 42,29 persen, berada dalam kategori kurang baik, 3). PNPM MP peran dalam mengurangi kemiskinan di Kecamatan Sokaraja yang baik relatif di mana 56,41 persen responden yang menerima penghasilan di atas garis kemiskinan (tidak miskin), 4), sementara perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih sangat terbatas karena hanya 10,26 persen responden yang pendapatannya dapat memenuhi kebutuhan hidup layak, 5). Distribusi peserta pendapatan responden PNPM MP di Kecamatan Sokaraja keseluruhan dalam kategori menengah dengan angka indeks gini dari 0,31; 6) Itu baru bisnis modal variabel yang memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat peserta PNPM MP. Hasil ini menyiratkan bahwa dalam rangka meningkatkan peran PNPM MP pada pengentasan kemiskinan perkotaan di Kecamatan Sokaraja diperlukan untuk: a). Kesadaran kepada masyarakat tentang tujuan dari dana PNPM MP, b). Bimbingan dan pelatihan usaha ekonomi produktif; c). Operasional bantuan dan melakukan upaya intensif untuk meningkatkan ekonomi produktif dan meningkatkan pendapatan keluarga; d). Sebuah tinjauan KSM yang memenuhi syarat untuk pendanaan PNPM MP; e) akses Semakin mudah modal untuk usaha mikro.

Kata kunci: PNPM Mandiri Perkotaan, kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, membutuhkan layak hidup.

## ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate and analyze: 1). Implementation of PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP) in community empowerment, 2). PNPM MP role in increasing income of participants communities of PNPM MP, 4). PNPM MP role in alleviating poverty; 5). PNMP MP role in improving welfare, and 5). Level of income distribution in participants communities of PNPM MP; 6) Influence of number of dependents education level, length of business and business capital toward income of participants communities of PNPM MP.

The data used is the primary data obtained from areas close to the sub district capital, intermediate to the sub district capital and farthest distance to the sub district capital of Sokaraja. For each region taken 10 percent of the existing KSM and the respondents are all members of KSM are selected as samples. Data analysis was done by tabulation, ratio or proportion, and multiple regression.

The results are : 1). Implementation of PNPM MP in the Sub district of Sokaraja in empowering the community as a whole is very good which is 82.05 percent of respondents using PNPM MP funds for productive activities, 2). The role of PNPM MP on overall family income of participants communities of PNPM MP is on average 42.29 percent, it is in the unfavorable category, 3). PNPM MP role in alleviating poverty in the sub district of Sokaraja is good relatively where 56.41 percent of respondents are receiving income above the poverty line (not poor); 4), while its role in improving the welfare of the community is still very limited because only 10.26 percent of respondents whose incomes can fulfil the needs of decent living; 5). The distribution of respondent's income participant of PNPM MP in the Sub district of Sokaraja overall in the intermediate category with a gini index figure of 0.31; 6) That is just business capital variable that give influence significantly toward income of participants communities of PNPM MP.

These results imply that in order to enhance the role of PNPM MP on urban poverty alleviation in Subdistrict Sokaraja necessary to: a). Awareness to the public about the purpose of funding of PNPM MP; b). Guidance and training on productive economic enterprises; c). Operational assistance and conduct an intensive effort to improve the productive economy and increasing family income; d). A review of the KSM are eligible for funding of PNPM MP; e) More and easier access to capital for micro enterprises.

**Key words:** PNPM Mandiri Perkotaan, poverty, community empowerment, needs a decent living.

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi sebagian besar negara-negara berkembang saat ini, oleh karena itu Konferensi Tingkat Tinggi Millenium PBB tahun 2000 menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan dengan mengurangi separuh dari kemiskinan dunia sebagai *Millenium Development Goals* bagi negara-negara anggota yang harus dicapai pada tahun 2015. Salah satu program pemerintah Indonesia yang relevan dengan upaya tersebut adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dikelompokkan untuk wilayah perdesaan dan perkotaan. PNPM merupakan program penanggulangan kemiskinan yang merupakan sintesa dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Berdasarkan survey SUSENAS tahun 2007 penduduk miskin di Banyumas mencapai 38 persen lebih tinggi dari hasil SUSENAS yaitu 14,49 persen (BPS, 2007). Program PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP) di Kabupaten Banyumas pada tahun 2010 dilakukan pada 8 (delapan) kecamatan perkotaan, yaitu : Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Utara, Sokaraja, Banyumas, Baturraden dan Kembaran. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sokaraja dengan pertimbangan bahwa di wilayah kecamatan Sokaraja dana PNPM yang digulirkan lewat Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) paling besar dibandingkan dengan wilayah lain selain itu juga karena penerima manfaat dalam KSM juga paling banyak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1). Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas; 2). Peranan PNPM Mandiri Perkotaan terhadap pendapatan masyarakat miskin; 3). Peranan PNPM MP dalam mengentaskan kemiskinan; 4). Peranan PNPM MP dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat; 5). Tingkat distribusi pendapatan dalam kelompok penerima BLM Ekonomi PNPM MP di kelurahan berjarak terjauh, menengah, dan terdekat dengan ibu kota Kecamatan Sokaraja; 6). Pengaruh tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, lama usaha dan modal usaha terhadap penerimaan pendapatan penerima BLM PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Sokaraja.

## **METODE ANALISIS**

### **Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan yang ada di wilayah Kecamatan Sokaraja. Untuk keperluan analisis, penelitian ini mengambil sampel dari beberapa KSM yang berada di beberapa desa yang dibedakan menurut jarak tempuh dari ibu kota kecamatan dengan asumsi bahwa perbedaan jarak ini akan mempengaruhi perbedaan perilaku masyarakatnya. Diambil 3 lokasi desa yaitu desa dengan jarak terjauh, jarak sedang, dan jarak terdekat dari ibu kota kecamatan. Berdasarkan data dari Kecamatan Sokaraja Dalam Angka (2009) diketahui bahwa desa dengan jarak terjauh dari ibu kota Kecamatan Sokaraja adalah Desa Jompo Kulon, jarak menengah adalah Desa Klahang, dan jarak terdekat dengan ibukota kecamatan adalah Desa Sokaraja Tengah. Kemudian, dari masing-masing desa

tersebut, diambil 10% dari jumlah KSM yang ada untuk kemudian diambil semua anggotanya untuk menjadi responden. Diperoleh 17 jumlah KSM sampel dengan 39 anggota yang memperoleh manfaat dari pinjaman dana bergulir dari PNPM – MP.

#### **Definisi Operasional Variabel**

- a. **Penerima Manfaat BLM PNPM MP adalah kelompok/orang yang menerima langsung dari kegiatan PNPM MP dalam hal ini adalah penerima Bantuan Langsung Masyarakat dalam bentuk bantuan bergulir, dalam satuan orang.**
- b. **Kegiatan ekonomi produktif adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penerima bantuan yang dapat memberikan pendapatan/penghasilan bagi diri dan keluarganya, dalam satuan unit usaha.**
- c. **Pendapatan penerima BLM adalah pendapatan yang diperoleh penerima bantuan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi produktif yang dilakukannya, dalam satuan rupiah.**
- d. **Jumlah bantuan modal usaha adalah besarnya bantuan modal yang diterima oleh penerima BLM, dalam satuan rupiah.**
- e. **Jumlah tanggungan keluarga adalah jumlah anggota keluarga yang menjadi beban tanggungan penerima bantuan, dalam satuan rupiah.**
- f. **Lama usaha adalah lamanya waktu penerima bantuan dalam melakukan kegiatan usahanya, dalam satuan tahun.**
- g. **Tingkat pendidikan adalah lamanya waktu yang digunakan penerima bantuan dalam menempuh pendidikan formalnya, dalam satuan tahun.**

#### **Teknik Analisis Data**

1. Pelaksanaan PNPM MP dalam hal pemberdayaan ekonomi, dianalisis dengan rumus:

$$X = \frac{\text{Resp}}{R} \times 100$$

**Keterangan:**

**X = Persentase responden yang memanfaatkan bantuan untuk kegiatan usaha produktif**

**Resp= Jumlah responden yang memanfaatkan bantuan untuk kegiatan ekonomi produktif**

**R = Jumlah seluruh responden**

**Kriteria (Fatihudin, 2009):**

- a. **Jika nilai X : 1-25%, termasuk kategori sangat kurang**
- b. **Jika nilai X : 26-49%, termasuk kategori kurang**
- c. **Jika nilai X : 50%, termasuk kategori cukup**
- d. **Jika nilai X : 51-75%, termasuk kategori baik**



e. Jika nilai X : 76-100%, termasuk kategori sangat baik

2. Peranan PNPM MP terhadap pendapatan keluarga penerima manfaat bantuan, dianalisis dengan rumus:

$$X_y = \frac{Y_{ep}}{Y} \times 100$$

Keterangan:

$X_y$  = Persentase pendapatan responden dari pemanfaatan bantuan

$Y_{ep}$  = Jumlah pendapatan responden yang diterima dari memanfaatkan bantuan

$Y$  = Jumlah seluruh pendapatan keluarga responden

Kriteria pengujian seperti poin 1 (Fatihudin, 2009).

3. Peranan PNPM MP dalam mengentaskan kemiskinan, dianalisis dengan perbandingan pendapatan yang diterima oleh penerima manfaat bantuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, dengan indikator garis kemiskinan perkotaan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Survei Sosial Ekonomi tahun 2010 (Maret 2010) yaitu sebesar Rp232.989,00 per kapita per bulan (BPS, 2010).

Kriteria pengujian (Fatihudin, 2009).

4. Peranan PNPM MP dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat bantuan, dianalisis dengan perbandingan pendapatan yang diterima oleh penerima manfaat bantuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, dengan pendapatan menurut standar Kebutuhan Hidup Layak yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas periode bulan Desember 2010 yaitu sebesar Rp 778.000,00 per kapita per bulan.

Kriteria pengujian (Fatihudin, 2009).

5. Tingkat distribusi pendapatan antar kelompok penerima manfaat bantuan pada lokasi yang berbeda, dianalisis dengan kriteria koefisien Indeks Gini, dengan rumus sebagai berikut (Suseno Triyanto Widodo, 2007):

$$G = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})$$

$X_k$  = proporsi kumulatif dari jumlah rumah tangga, untuk  $k = 0, \dots, n$ , dengan  $X_0 = 0$ ,  $X_n = 1$ .

$Y_k$  = proporsi kumulatif dari jumlah pendapatan rumah tangga sampai kelas ke- $k$ , untuk  $k = 0, \dots, n$ , dengan  $Y_0 = 0$ ,  $Y_n = 1$ .

Kriteria Indeks Gini menurut H.T.Oshima (Suseno Triyanto Widodo, 2007):

Apabila nilai IG < 0,3 : kategori ketimpangan rendah; nilai IG 0,3 - 0,4 : ketimpangan sedang; nilai IG > 0,4 : ketimpangan tinggi

6. Pengaruh jumlah modal usaha, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman usaha, dan tingkat pendidikan terhadap pendapatan penerima manfaat bantuan, dianalisis menggunakan regresi berganda dengan metode OLS. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Gujarati, 2001):

$$Y_{kap} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e_t$$

Keterangan:

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien regresi tingkat pendidikan

$\beta_2$  = Koefisien regresi dari Jumlah tanggungan keluarga

$\beta_3$  = Koefisien regresi dari Lama usaha

$\beta_4$  = Koefisien regresi dari modal usaha

$e_t$  = faktor pengganggu (*error term*)

Ketepatan model diuji dengan asumsi klasik.

## HASIL ANALISIS

### 1. Pelaksanaan PNPMP Mandiri Perkotaan dalam Pemberdayaan Ekonomi di Kecamatan Sokaraja

Pelaksanaan PNPMP MP dalam pemberdayaan ekonomi dilihat dari ketepatan pemanfaatan BLM PNPMP MP dalam kegiatan ekonomi produktif. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah total responden di Kecamatan Sokaraja ada 39 orang dan jumlah responden yang memanfaatkan BLM PNPMP MP untuk kegiatan produktif berjumlah 32 orang, dimana kegiatan produktif tersebut ada yang menjadi mata pencaharian pokok dan ada yang menjadi mata pencaharian sampingan.

Apabila melihat perbandingan antara total penerima BLM PNPMP MP dengan penerima BLM PNPMP MP yang memanfaatkan dananya untuk melakukan kegiatan produktif maka diperoleh nilai rasio sebesar 82,05 persen. Artinya, 82,05 persen penerima BLM PNPMP MP memanfaatkan dananya untuk kegiatan produktif, yang diharapkan dapat mampu meningkatkan perbaikan pendapatan masyarakat, membuat mereka lebih mandiri sehingga pada akhirnya dapat mengeluarkan mereka dari kondisi kemiskinan. Nilai proporsi tersebut berada dalam kisaran 76 – 100 persen, dan ini menunjukkan bahwa ketepatan pemanfaatan BLM PNPMP MP dalam hal pemberdayaan ekonomi di Kecamatan Sokaraja termasuk kategori sangat baik.

Apabila dirinci berdasarkan wilayah kelurahan sampel berdasarkan jarak dari ibukota Kecamatan Sokaraja, diketahui jumlah responden yang menerima dana bergulir untuk kegiatan ekonomi produktif di wilayah yang jauh dari ibu kota kecamatan tingkat ketepatan

pemanfaatannya tergolong baik (70,95 persen) sedangkan untuk dua wilayah lainnya yaitu yang berjarak menengah dan dekat dengan ibu kota kecamatan tingkat ketepatan pemanfaatannya dalam kategori sangat baik (90,91 persen).

## **2. Peranan PNPMP terhadap Pendapatan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan**

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa jumlah total pendapatan responden dari kegiatan usaha produktif adalah Rp18,1 juta sedangkan jumlah total pendapatan responden adalah Rp42,8 juta, sehingga apabila dilihat rasionya, maka diperoleh nilai rasio sebesar 42,29 persen. Nilai tersebut berada dalam kisaran 26 – 49 persen, dan ini menunjukkan bahwa peranan PNPMP terhadap pendapatan keluarga di Kecamatan Sokaraja termasuk kategori kurang.

Apabila dihubungkan dengan hasil analisis di poin 4.2.1. dimana pemanfaatan dana BLM PNPMP di Kecamatan Sokaraja termasuk kategori sangat baik tetapi peranannya terhadap pendapatan keluarga masih relatif kurang, hal ini disebabkan karena usaha produktif yang mereka lakukan masih tergolong usaha skala mikro dengan segala keterbatasannya, baik dalam hal permodalan, pengetahuan dan keterampilan pendukung, pemasaran, dan pengembangan usahanya, sehingga hasilnya belum dapat maksimal.

Disamping itu, ternyata ditemukan fakta bahwa dana bergulir yang diterima oleh masyarakat tidak semua dialokasikan untuk melakukan kegiatan produktif, tapi juga untuk kegiatan konsumsi, membeli barang tahan lama, maupun untuk kegiatan sosial. Secara keseluruhan rata-rata dana pinjaman bergulir hanya 50,71 persen saja yang digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif. Sisanya untuk kegiatan konsumsi yaitu rata-rata sebesar 34,55 persen, untuk pembelian barang tahan lama sebesar 13,87 persen dan untuk kegiatan sosial sebesar 0,87 persen.

Apabila dirinci per wilayah maka kondisinya secara berturut-turut yang porsi pemanfaatan dana pinjamannya paling banyak untuk kegiatan ekonomi produktif adalah wilayah yang berjarak menengah dari ibu kota kecamatan mencapai 63,63 persen, kemudian wilayah yang berjarak terjauh dari ibu kota kecamatan dan yang terakhir adalah wilayah yang terdekat dengan ibu kota kecamatan.

## **3. Peranan PNPMP dalam Mengentaskan Kemiskinan**

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa dari 39 orang responden, ternyata ada 22 orang responden yang memiliki pendapatan lebih besar dari pendapatan yang menjadi indikator batas garis kemiskinan perkotaan berdasarkan Survei Sosial Ekonomi BPS, 2010 (Rp232.989,00 per kapita per bulan). Dengan demikian berarti bahwa 56,41 persen jumlah responden penerima BLM PNPMP hidup berada di atas garis kemiskinan. Nilai ini berada dalam kisaran 51 – 75 persen, sehingga dapat dikatakan bahwa peranan PNPMP dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Sokaraja berada dalam kategori baik.

Apabila dirinci berdasarkan wilayah kelurahan sampel berdasarkan jarak dari ibukota Kecamatan Sokaraja, maka terlihat bahwa untuk wilayah yang dekat dengan ibu kota

kecamatan demikian juga untuk wilayah jauh, peranan PNPM MP dalam mengentaskan kemiskinan berada pada kategori kurang yang ditunjukkan dengan indikator persentase jumlah responden yang memiliki pendapatan per kapita di atas garis kemiskinan berada pada kisaran angka 26 – 49 persen. Sedangkan peranan PNPM MP untuk kelurahan dengan jarak menengah dari ibukota kecamatan berada dalam kategori sangat baik yang terlihat dari persentase jumlah responden yang menerima pendapatan di atas garis kemiskinan sebesar 100 persen. Hal ini dimungkinkan karena responden di wilayah ini memanfaatkan sebagian besar dana BLM yang diterimanya untuk kegiatan produktif yang mencapai 63,63 persen sehingga dampak terhadap pendapatan yang diterimanya pun relatif lebih besar.

#### **4. Peranan PNPM MP dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

Untuk menganalisis peranan PNPM MP dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat bantuan, digunakan perbandingan pendapatan yang diterima oleh penerima manfaat bantuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, dengan pendapatan menurut standar Kebutuhan Hidup Layak yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas periode bulan Desember 2010 yaitu sebesar Rp 778.000,00 per kapita per bulan. Standar KHL memiliki cakupan yang lebih luas dari garis kemiskinan, dengan 7 komponen utamanya yaitu: makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan tabungan

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa dari 39 orang responden, ternyata baru 4 orang responden yang memiliki pendapatan lebih besar dari pendapatan yang menjadi indikator batas pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ditetapkan (Rp 778.000,00 per kapita per bulan). Dengan demikian berarti bahwa baru 10,26 persen jumlah responden penerima BLM PNPM MP menikmati hidup secara layak. Nilai ini berada dalam kisaran 1-25 persen, sehingga dapat dikatakan bahwa peranan PNPM MP dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berada dalam kategori sangat kurang.

Apabila dirinci berdasarkan wilayah kelurahan sampel berdasarkan jarak dari ibukota Kecamatan Sokaraja, maka gambaran Peranan PNPM MP dalam pengentasan kemiskinan terlihat bahwa untuk wilayah yang terdekat dan terjauh dari ibukota kecamatan, peranan PNPM MP dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat kurang berhasil dimana belum ada seorang pun yang menerima pendapatan di atas KHL, sedangkan untuk wilayah menengah proporsi responden yang menerima pendapatan per kapita di atas KHL yang ditetapkan berada berjumlah 4 orang (36,36 persen) berada pada kisaran 26-49 persen berarti termasuk kategori kurang.

Apabila dihubungkan dengan hasil bahasan sebelumnya, hal ini berarti bahwa PNPM MP di Kecamatan Sokaraja telah baik dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, tetapi pendapatan yang diperolehnya belum cukup untuk menjamin mereka dapat hidup secara lebih layak.

## 5. Tingkat distribusi pendapatan dalam kelompok penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Berdasarkan hasil perhitungan indeks gini sebagai salah satu alat ukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antara kelurahan dengan jarak terdekat, menengah, dan terjauh dengan ibukota kecamatan di Sokaraja, maka dapat diketahui bahwa secara keseluruhan, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kecamatan Sokaraja termasuk kategori sedang yang ditunjukkan oleh nilai Indeks Gini 0,31 berada dalam kisaran antara 0,3 – 0,4. Apabila dirinci menurut kelurahan sampel terlihat bahwa untuk kelurahan dengan jarak terdekat, indeks ginya bernilai  $0,59 > 0,4$  berarti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di wilayah kelurahan tersebut termasuk kategori tinggi. Untuk kelurahan dengan jarak menengah memiliki nilai indeks gini  $0,18 < 0,3$  berarti bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatannya termasuk kategori rendah, sedangkan untuk kelurahan dengan jarak terjauh memiliki indeks gini berada dalam kisaran antara 0,3 – 0,4 berarti bahwa ketimpangannya termasuk kategori sedang.

## 6. Pengaruh Jumlah Tanggungan Keluarga, Tingkat Pendidikan, Lama Usaha dan Jumlah Modal Usaha terhadap Pendapatan Penerima Manfaat Bantuan

Hasil perhitungan regresi menunjukkan hasil sebagai berikut:

$$\ln Y = -44,83 - 0,48 \ln X_1 + 2,32 \ln X_2 + 2,86 \ln X_3 + 25,47 \ln X_4$$

$$t\text{-hitung} : C = -1,28; X_1 = -0,05; X_2 = 0,95; X_3 = 1,36; X_4 = 7,24$$

$$F\text{-statistic} : 15,24; \text{Adjusted R-square} : 0,6404$$

Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut di atas terlihat bahwa Adjusted R-square bernilai 0,6404. Artinya, variabel jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, lama usaha, dan modal usaha mampu menjelaskan perubahan pendapatan usaha sebesar 64,04 persen, sedangkan 35,96 persen dijelaskan oleh variabel lainnya.

Apabila dilihat secara bersama-sama, variabel jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, lama usaha, dan modal usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha. Hal ini terlihat dari nilai F-statistic 15,24 dengan probabilitas 0,00. Tetapi apabila dilihat secara parsial, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha hanyalah modal usaha ( $X_4$ ) dengan nilai t-hitung 7,24 dengan probabilitas t-statistic 0,00, sedangkan untuk variabel lainnya berpengaruh secara tidak signifikan.

Koefisien regresi  $X_4$  sebesar 25,47 berarti bahwa setiap kenaikan modal usaha sebesar 1 persen akan menyebabkan pendapatan usaha meningkat sebesar 25,47 persen atau dengan kata lain, perubahan pendapatan usaha bersifat elastis terhadap perubahan modal usaha, artinya proporsi perubahan pendapatan usaha lebih besar daripada proporsi perubahan modal usaha. Modal usaha ditambah sedikit saja akan berdampak meningkatkan pendapatan usaha yang lebih besar daripada penambahan modal usaha itu sendiri.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Sokaraja termasuk kategori sangat baik, dimana 82,05 persen BLM PNPM MP digunakan untuk kegiatan usaha produktif.
2. Peranan PNPM MP terhadap pendapatan keluarga penerima manfaat bantuan termasuk kategori kurang, dimana proporsi pendapatan dari kegiatan usaha produktif terhadap pendapatan total keluarga baru sebesar 42,29 persen.
3. Peranan PNPM MP terhadap pengentasan kemiskinan termasuk kategori baik, dimana 56,41 persen jumlah penerima manfaat bantuan memiliki pendapatan per kapita yang lebih besar dari pendapatan batas garis kemiskinan perkotaan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Survei Sosial Ekonomi tahun 2010 (Maret 2010) yaitu sebesar Rp232.989,00 per kapita per bulan.
4. Peranan PNPM MP terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk kategori sangat kurang, dimana baru 10,26 persen jumlah penerima manfaat bantuan memiliki pendapatan per kapita yang lebih besar dari pendapatan yang memenuhi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas periode bulan Desember 2010 yaitu sebesar Rp 778.000,00 per kapita per bulan.
5. Wilayah kelurahan dengan jarak terdekat dari ibukota kecamatan Sokaraja memiliki ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi, wilayah kelurahan dengan jarak menengah memiliki ketimpangan distribusi pendapatan yang rendah dan wilayah kelurahan terjauh memiliki tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang sedang. Namun apabila dilihat secara keseluruhan, ketimpangan distribusi pendapatan di Kecamatan Sokaraja termasuk kategori sedang
6. Apabila dilihat secara bersama-sama variabel jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, lama usaha, dan modal usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha. Tetapi apabila dilihat secara parsial, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha hanyalah modal usaha, sedangkan variabel lainnya berpengaruh secara tidak signifikan. Setiap kenaikan modal usaha sebesar 1 persen akan menyebabkan pendapatan usaha meningkat sebesar 25,47 persen atau dengan kata lain, perubahan pendapatan usaha bersifat elastis terhadap perubahan modal usaha, artinya proporsi perubahan pendapatan usaha lebih besar daripada proporsi perubahan modal usaha. Modal usaha ditambah sedikit saja akan berdampak meningkatkan pendapatan usaha yang lebih besar daripada penambahan modal usaha itu sendiri.

### Saran

1. Pelaksanaan PNPM MP sudah sangat baik tapi peranan terhadap pendapatan keluarga masih kurang, hal ini disebabkan karena usaha produktif mereka masih bersifat skala usaha mikro. Oleh karena itu untuk memberikan hasil nyata dari pemanfaatan BLM ini terhadap peningkatan pendapatan penerima manfaat bantuan BLM pemerintah daerah perlu

melakukan upaya kerjasama secara intensif dengan berbagai pihak yang kompeten di bidangnya, dalam rangka mendorong pengembangan skala usaha yang mereka lakukan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan peranan dana bantuan terhadap pendapatan keluarga, maka perlu upaya terus menerus untuk semakin menyadarkan masyarakat mengenai tujuan dari BLM PNPM sehingga mereka benar-benar memanfaatkan dana yang diterimanya untuk melakukan kegiatan produktif dan juga perlu peninjauan ulang mengenai kelompok KSM yang benar-benar berhak untuk mendapatkan dana BLM PNPM MP.

2. Peranan BLM PNPM MP terhadap pengentasan kemiskinan termasuk kategori baik tapi terhadap KHL masih tergolong sangat kurang. Hal ini berarti bahwa pendapatan usaha yang mereka terima relatif kecil baru cukup untuk menutupi kebutuhan sandang, pangan, papan. Oleh karena itu, perlu upaya secara terus menerus meningkatkan pendapatan melalui penyuluhan-penyuluhan mengenai usaha ekonomi produktif, pengembangan keterampilan dan pelatihan yang relevan dengan usaha produktif, sehingga banyak peluang untuk melakukan berbagai kegiatan produktif, memperluas jaringan pemasaran, pendampingan usaha secara terus-menerus sehingga usaha produktif yang mereka lakukan dapat lebih berkembang secara berkelanjutan.
3. Untuk lebih pemeratakan distribusi pendapatan di wilayah kelurahan dengan jarak terdekat, maka perlu identifikasi lebih mendalam terhadap factor yang menjadi sumber utama ketimpangan. Apabila sumber utamanya berasal dari heterogenitas dalam hal kemampuan berusaha, maka perlu ada upaya intensif dari pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang terkait untuk memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam melakukan usaha-usaha produktif. Sedangkan untuk wilayah di kelurahan menengah dan terjauh yang memiliki distribusi pendapatan yang relatif lebih merata, juga perlu upaya untuk terus meningkatkan pendapatan mereka agar pemerataan pendapatan ini terjadi pada tingkat pendapatan yang relatif tinggi.
4. Modal usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha yang dilakukan masyarakat. Oleh karena itu maka perlu mempermudah akses terhadap modal antara lain dengan melanjutkan program BLM PNPM MP ini dengan memberikan modal pinjaman yang lebih besar kepada anggota KSM yang berhasil dalam melakukan usahanya atau dengan mempermudah akses kredit perbankan bagi usaha kecil yang bersifat lebih lunak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2007. *Potret dan Prospek Ekonomi Indonesia*. Hasil Susenas 2007.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia*.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Penduduk Miskin (Poor Population)*. Berita Resmi Statistik Penduduk Miskin No.04/Th.II/July 2009. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Kecamatan Sokaraja Dalam Angka*.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Profil Kemiskinan di Indonesia*. Berita Resmi BPS, Maret 2010. No. 45/07/Th.XIII, 1 Juli 2010.
- Badriah, Lilis Siti. 2007. Perubahan Struktur Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi Regional*, Vol. 10 No.4.
- Bappeda Kabupaten Banyumas, 2006. *Kemiskinan dan Persanggulungannya*. Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- Bappenas, 2009. Pengembangan Program Pengentasan Kemiskinan <http://www.bappenas.go.id>. Diakses, Kamis 3 Feburari 2011.
- Fatihudin, Didin, Noto Adam, Misrin Hariyadi, Iis Holisin. 2009. Model Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Home Industry Sepatu/Sandal Melalui Peningkatan Modal, Keterampilan, dan Perluasan Pasar di Kemasan Krian Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3. No. 3, Nopember 2009. Hal. 187-191.
- Fetterman, David and Wandersman, Abraham, 2007. Empowerment Evaluation: Yesterday, Today, and Tomorrow. *American Journal of Evaluation* 2007;28; 179
- Gujarati, Damodar, 2001. *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Erlangga, Jakarta.
- Gunawan, Sumodiningrat, 2002. *Sinkronisasi Program Penanggulangan kemiskinan*. Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Mubyarto, 2002. Ekonomi Rakyat Indonesia. *Jurnal Ekonomi Rakyat* Th.I-No.1-Maret 2002.



- Potts, David, 2003. *Development Planning and Poverty Reduction*, Palgrave Macmillan. NewYork.
- Rahajuni, Dian. 2009. Dampak Implementasi Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di kabupaten banyumas (Study Kasus Di Kecamatan Kedungbanteng). *Solusi*, Vol. 8 No.4.
- \_\_\_\_\_. 2010. Distribusi Pendapatan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya Pada Keluarga Miskin di Kecamatan Kedungbanteng kabupaten Banyumas. Fakultas Ekonomi, Unsoed.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Citra Utama. Jakarta.
- Tambunan, Tulus T.H. 2001, *Perekonomian Indoncsia : Teori dan Temuan Empiris*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2009. Penjelasan dan Tanya Jawab Seputar Program Nasional! Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008. PNPM Mandiri, edisi 2, September 2008.
- Usman, Sunyoto, 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Widodo, Suseno Triyanto. 2007. *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Kanisius. Yogyakarta.